

PERKEMBANGAN MODERNISME DI IRAN ABAD XIX - XX

Ahmad Sodikin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ahmadsodikin@iainponorogo.ac.id

Abstract: *Modernism is a movement that originated in the western world to replace the teachings of the Khatlik religion with modern science and philosophy. The culmination of this movement was the process of secularization in the western world. Iran before the revolution, was under the regime of Reza Shah Pahlevi who was an admirer of Turkey during the regime of Mustafa Attaturk. Under his authoritarian rule he imposed a program of economic modernization, and persistent westernization of culture. In this he built military power, overcame the opposition of religious elites, merchants, tribal elites, and abolished the influence of the clergy. All are under the control of the country he leads. At the moment there is an important conflict between the ruler and the controlled (opposition), which is spearheaded by Iranian Muslim scholars. The most visible figures in this movement are Ali Shariati and Ayatullah Khomeini. So there was a catastrophic upheaval and the culmination was the Iranian revolution of 1979. Therefore, this research becomes important to discuss further, so as to obtain a complete, systematic, and chronological understanding. This type of research is historical research that relies on sources in library studies (library riseacrh). Operationally the historical method rests on four things; heuristics, criticism, interpretation, and historiography. To see and analyze the development of modernism in Iran of the XIX – XX centuries, researchers use sociological-political approaches and conflict theory. A sociological approach to looking at society and a political approach to examining the ruler, power, and policies taken by the ruler. From there, the sociology-political approach is dynamic and keeps up with the times, so it is interesting to be used as an analysis knife in looking at the political dynamics of a particular country or region. Meanwhile, conflict theory is used to examine the events that occurred in Iran and their impact after the events. The finding of this study was the occurrence of Iranian Revoltion in 1979. It was the success of Iran's Islamic Revolution that succeeded in subverting the Pahlevi dynasty that had changed the political system and state form of Iran from an absolute monarchy to an Islamic republic. The Iranian Revolution was encouraged by Ali Shariati and Ayatullah Khomeini, in moving the time to carry out the Revolution against the Pahlevi regime. After the revolution ended, there were changes and improvements to the system in Iran. These changes and changes include; in the field of education, in the field of religion, and in the field of politics.*

Keywords: *Development, Modernism, Iran XIX – XX Century*

Abstrak: modernisme adalah suatu gerakan yang berawal dari dunia barat untuk menggantikan ajaran agama Khatolik dengan sains dan filsafat modern. Puncak dari gerakan ini adalah proses sekularisasi di dunia barat¹. Iran sebelum terjadinya revolusi, berada dibawah rezim Reza Shah Pahlevi yang merupakan pengagum Turki dimasa rezim Mustafa Attaturk. Dibawah pemerintahannya yang otorititer ia memberlakukan program modernisasi ekonomi, dan westernisasi kultural secara gigih. Dalam hal ini ia membangun pasukan militer, mengatasi oposisi elite agama, pedagang, elite kesukuan, dan menghapus pengaruh ulama². Semua berada dibawah kontrol negara yang dipimpinya. Di masa ini terjadi konflik yang krusial antara penguasa dan yang dikuasai (oposisi), yang dipelopori oleh cendikiawan muslim Iran. Tokoh yang paling nampak didalam pergerakan ini adalah Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini. Maka terjadilah peristiwa pergolakan yang sangat dahsyat dan puncaknya adalah revolusi Iran tahun 1979. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut, sehingga mendapatkan pemahaman yang lengkap, sistematis, dan kronologis. Jenis penelitian adalah penelitian sejarah yang mengandalkan sumber pada studi pustaka (library riseacrh). Secara operasional metode sejarah bertumpu pada empat hal; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk melihat dan menganalisis perkembangan modernisme di Iran abad XIX – XX, maka peneliti menggunakan pendekatan sosiologi-politik dan teori konflik. Pendekatan sosiologi untuk melihat masyarakat dan pendekatan politik untuk mengkaji para penguasa, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dari itu pendekatan sosiologi-politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat dinamika politik suatu negara atau wilayah tertentu. Sementara itu teori konflik digunakan untuk mengkaji peristiwa yang terjadi di Iran dan dampaknya pasca terjadinya peristiwa tersebut. Hasil temuan dari penelitian ini adalah terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979. Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang berhasil menumbangkan dinasti Pahlevi yang telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran dari monarki absolut menjadi republik Islam. Revolusi Iran ini dimotori oleh Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini, dalam menggerakkan masa untuk melakukan Revolusi menentang rezim Pahlevi. Setelah peristiwa revolusi berakhir, maka teradi perubahan dan pembenahan sistem di Iran. Perubahan dan perubahan tersebut antara lain; dibidang pendidikan, dibidang keagamaan, dan dibidang politik.

Kata kunci: *Perkembangan, Modernisme, Iran Abad XIX – XX*

PENDAHULUAN

Dari segi geo-politik, Iran berada di lokasi yang sangat strategis di wilayah Timur Tengah. Dengan posisi Geografis yang sedemikian rupa Iran selalu menjadi salah satu wilayah terpenting dari strategi global negara-negara besar. Bukan hanya dari segi politik, tapi juga dari segi ekonomi. Karena posisi Iran berada di jalur pelayaran internasional.

Dalam pemeritahan politik Iran menggunakan politik Islam, Dinasti Qajar memimpin sebelum kemudian digantikan oleh rezim Pahlevi. Kebijakan yang dilakukan oleh rezim Pahlevi bagi sebagian kelompok sudah menyimpang dari Islam. Rezim ini

¹ Abdul Hamid & Yaya, *Pemikiran Modern dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010. Hal. 45.

² Siti Maryam, dkk. *Peradaban Islam di Persia*. Dalam Sejarah Peradaban Islam; Dari Klasik hingga modern. Yogyakarta: LESFI, 2009. Hal. 292.

menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut dan cenderung otoriter. Disamping itu rezim ini juga memiliki keterikatan yang kuat dengan Barat, dan memberlakukan modernisasi yang cenderung mirip dengan Barat. Oleh karena itu banyak terjadi perlawanan-perlawanan dari rakyat Iran dan golongan ulama yang menginginkan sebuah perubahan.

Serangan besar kolonialisme dan imperialisme barat ke dunia Islam dari segala arah pada abad kesembilanbelas dan abad kedua puluh melalui berbagai cara. Diantaranya adalah melalui dimensi pemikiran, politik, ekonomi, militer dan dimensi sosial kebudayaan. Dengan memperlihatkan dasar-dasar ketidakmampuan, ketertinggalan pemikiran, politik, dan ekonomi kaum muslimin, menyebabkan munculnya ide pembenahan, perubahan dan modernisasi serta perlawanan terhadap pengaruh barat pada masyarakat Islam. Angin revolusi yang dihembuskan barat menimbulkan adanya upaya pembenahan di dunia Islam, perjuangan membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, membentuk dan mengembangkan negara bangsa yang merdeka dengan segala tekanan dan permasalahan modernisasi.

Adapun litetatur terdahulu yang penulis temukan terkait pembahasan penelitian ini antara lain: tulisan Wisnu Fachruddin Sumarno, *Sejarah Politik Islam di Iran Tahun 1905-1979*. Jurnal Sangkep, Jurnal Kajian Sosial-Keagamaan, Vol. 3, No. 2. 2020. Jurnal ini membahas tentang perpolitikan Islam di Iran dengan rentang waktu antara tahun 1905 hingga 1979. Sistem perpolitikan Iran ini pada dasarnya adalah sistem republik. Akan tetapi menggunakan sistem *wilayatul faqih*. Hal ini dapat dilihat misalnya dari kepala pemerintahan yang dipegang presiden, dipilih oleh rakyat. Namun kekuasaan presiden ini dibawah *Mullah*, dan *Mullah* dapat memberhentikan presiden. Sementara itu kekuasaan Yudikatif yang tertinggi dipegang oleh mahkamah agung, dipilih oleh *rahbah* yang membawahi pengadilan propinsi dan pengadilan rendah kota.

Tulisan Abd. Kadir, *Syiah dan Politik: Studi Islam Iran*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 5, No. 1, 2015. Jurnal ini membahas sisi keagamaan di Iran yaitu Syiah dan tatanan politiknya dari masa klasik hingga modern. Dalam hirarki kekuasaan sistem wilayatul faqih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah Swt. Sedangkan pemegang kekuasaan penuh adalah Imam Mahdi yang masih gaib hingga sekarang.

Dari kedua artikel diatas dapat diketahui bahwa apa yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada batasan spasial dan temporalnya. Hal ini dapat dilihat dari sisi tahun dan pembahasan yang diuraikan, sehingga nampak perbedaannya. Perbedaan tersebut adalah pada perkembangan modernisme dengan tahapan-tahapannya yang kompleks. Sementara itu kedua artikel tersebut hanya fokus dari satu sisi dalam pembahasan yaitu aspek yang paling menonjol. Oleh karena itu berbeda dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif-naratif dan merupakan sejarah kritis, sehingga aspek analisis menjadi acuan utama dalam penulisan. Adapun data-data yang digunakan bersumber pada *library research* (studi pustaka) dengan

mengandalkan pada buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, web. internet yang masih relevan. Menurut Gottschalk, sebagaimana dikutip oleh Basri MS, metode sejarah merupakan sebuah proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.³ Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah yaitu: pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan penelitian (historiografi). Secara operasional penelitian ini menggali data-data terkait modernisme di Iran abad XIX – XX dan data-data lain yang mendukung pembahasan tersebut. Kemudian data-data itu disusun dan disintesis secara sistematis hingga menjadi sebuah historiografi yang utuh dan menyeluruh (komprehensif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonialisme Barat dan dampaknya di Iran

Intervensi Eropa yang sangat penting adalah memodifikasi posisi rezim Qajar dan meningkatkan ketegangan yang tidak kentara antara negara dan ulama. Campur tangan bangsa Eropa terhadap Iran pertama kali datang dalam bentuk penaklukan dan pengukuhan pengaruh mereka melalui persaingan antar kekuatan-kekuatan Eropa. Dalam rentangan abad delapan belas dan sembilan belas Rusia merebut kekuasaan atas wilayah barat laut Iran. Perjanjian Gulistan (1813) menyatakan pelepasan Rusia dari penguasaan terhadap Georgia, Darband, Baku, Shirvan, dan beberapa daerah Armenia lainnya.⁴

Pada tahun 1826 Rusia merebut Tabriz dan setelah itu perjanjian Turk Manchai (1828) Rusia merebut kembali Armenia, menguasai lautan Caspia, dan meraih posisi yang menguntungkan dalam perdagangan Iran. Antara tahun 1864 dan 1885 gelombang baru penaklukan Rusia memuncak pada pencaplokan beberapa propinsi Iran di Asia Tengah. Kemudian setelah tahun 1857 bentuk utama penetrasi Inggris dan Rusia adalah di bidang perekonomian.⁵ Pada tahun 1872 pemerintah Iran memberikan konsesi yang besar kepada Baron de Reuter.

De Reuter diberikan hak menguasai penghasilan cukai selama 24 tahun, hak memonopoli pembangunan lintasan kreta api, hak-hak khusus untuk menambang sejumlah tambang mineral dan baja, membangun kanal dan proyek irigasi, hak pertama untuk menguasai atau penolakan terhadap perbankan nasional, proyek jalan, telegraf, penggilingan dengan memberikan royalti kepada sang Shah. Pada tahun 1889 *Imperial Bank of Persia* didirikan dengan bantuan Inggris, dan pada tahun 1890 sebuah perusahaan Inggris diberikan hak monopoli industri tembakau Iran.⁶

Akibat dari monopoli ini rakyat bangkit melakukan perlawanan pada tahun 1891 sewaktu Ayatollah Hasan al-Shirazi, mengumumkan fatwa melarang menghisap tembakau. Sanggahan terhadap tembakau ini mendapat dukungan kuat dari Jamaluddin

³ Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 34.

⁴ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*. Terj. Ghufron A. Mas'adi (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 34-35.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

al-Afghani, penasehat Shah. Dia berkirim surat kepada sarjana-sarjana bagaimana supaya menolak konsesi ekonomi itu yang akan merupakan awal kekuasaan pihak asing. Peranan al-Afghani dalam agitasi politik pihak umum menyebabkan dirinya mengalami pengusiran ke luar Iran.⁷ Pemboikotan secara luas (1891-1892) dipimpin oleh pemuka keagamaan dan kaum dagang. Pemuka keagamaan memberikan fatwa bahwa menghisap tembakau dilarang, dan pasar-pasar ditutup, oposisi politik dan demonstrasi semakin meluas.

Akhirnya pada tahun 1907 perjanjian Inggris-Rusia membagi Iran menjadi dua wilayah yaitu bagian utara dan bagian selatan. Hal ini menyebabkan sebagian besar petani dan penggarap sawah kehilangan mata-pencarian mereka. Dengan demikian para petani menjadi miskin dan terlalu rentan untuk terlibat dalam gerakan kebangkitan. Oleh karena itu para kaum terpelajar, pemuka agama, saudagar, kepala suku, tuan tanah melakukan gerakan pembaharuan. Ideologi Syi'ah dengan berbagai lambangnya, pimpinan gerakan nasionalis dan Islam memiliki peranan sentral dalam gerakan ini.⁸

Gerakan-Gerakan Pembaharuan di Iran

Ada tiga pola dalam gerakan pembaharuan di Iran selama abad ke 20 yaitu: pertama, perkembangan komunisme dan sekularisme radikal dalam masalah sosial. Kedua, yang berorientasi politik adalah nasionalisme liberal, yang sangat menentang pengaruh asing di Iran dan menyadari perlunya pembaharuan sosio-ekonomi tetapi lebih konservatif dibanding pendekatan komunis dalam pengertian program-program aktualnya. Ketiga, kelompok yang memiliki orientasi lebih intelektual berkaitan dengan penafsiran kembali warisan Iran dan keperluan-keperluan bagi Iran modern.⁹

Gerakan komunis di Iran muncul selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia I. Suatu kelompok yang bernama "Adalat" telah diorganisasikan di kalangan para buruh Persi di Baku, di wilayah Kaukasus-Rusia, dan pada tahun 1918 mereka menggempur konsulat Iran. Dengan bantuan Rusia kelompok itu aktif di Iran, bekerjasama dengan gerakan nasionalis lokal di utara propinsi Gilan, dan dengan cepat membantu berdirinya "Republik Sosialis Soviet-Rusia".¹⁰ Keberhasilan gerakan Gilan melukiskan masalah komunisme yang terorganisir di Iran. Mereka berkolega dengan gerakan nasionalis Jangli liberal di Gilan yang dipimpin oleh Kuchek Khan, komunis berhasil memperoleh dukungan, tetapi kemampuan komunis untuk mempertahankan dukungan itu dengan cepat melemah. Ketergantungan komunis lokal pada Soviet telah menimbulkan kesangsian dalam pikiran orang-orang Iran nasionalis, dan melemahnya kepercayaan terhadap negara asing diperlihatkan dengan hancurnya gerakan Gilan sebagai akibat kebijakan Soviet untuk menghentikan bantuan militernya.

⁷ Jhon L. Esposito, *Islam dan Politik*. terj. M. Joesoef Sou'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hal. 115-116.

⁸ *Ibid.*

⁹ Jhon Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997) Cet. 1, hal. 252.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 252-253.

Kekuasaan yang kaku dari pemerintah Reza Shah telah membatasi kemampuan komunisme untuk mengembangkan perubahan. Akan tetapi kehancuran rezim Reza Shah dan pendudukan bagian wilayah utara Iran oleh Rusia memberikan kesempatan pada organisasi parta Tudeh. Tudeh memberikan pembaharuan sosio-ekonomi yang radikal. Mengiringi perang dunia II kelompok nasionalis liberal muncul sebagai kekuatan politik yang utama dan diperkuat oleh tumbuhnya kelas terdidik-modern. Kalangan nasionalis liberal berhasil mencapai kekuasaan pada tahun 1950 di bawah kepemimpinan Mohammad Mosaddiq.¹¹

Sejak tahun 1960-an kelompok nasionalis liberal mulai mengorganisasikan penentangan terhadap Syah tetapi banyak mengalami kesulitan. Islam Syi'ah menghadirkan dasar-dasar ideologi untuk menentang perluasan kekuasaan monarki, dan gerakan itu telah muncul sebagai sintesis pemimpin-pemimpin yang lebih liberal. Bazargan dan Taliqani menekankan pentingnya keterlibatan yang aktif ulama dalam persoalan-persoalan politik, dan berusaha merumuskan kembali tradisi Islam yang sesuai dengan kalangan Muslim terdidik-modern. Mereka menjadi matarantai antara tradisi nasionalis liberal pemimpin keagamaan fundamentalis yang aktif seperti Ayatollah Khomeini¹², sehingga ia diasingkan ke Irak. Setelah kembali dari pengasingan yakni pada tahun 1961 Khoemaii menyerukan sebuah pemerintahan parlementer.

Khoemaii berhujjah dengan prinsip-prinsip dasar jihad dan amar makruf, ulama wajib memberontak pemerintahan yang deprestik. Selanjutnya antara tahun 1967 dan 1973 gerakan reformasi mendapat bimbingan baru dalam kepemimpinan Dr. Ali Syari'ati yang mendirikan yayasan *Husainiyah Irsyad*. Yayasan ini merupakan universitas informal yang ditujukan untuk merevitalisasi Syi'isme dengan memadukan prinsip ajaran Islam dengan sains Eropa sehingga melahirkan komitmen untuk menggulingkan sebuah pemerintah yang lalim. Pada tahun 1970-an rezim Pahlevi menjadi semakin sewenang-wenang dari sebelumnya. Pasukan militer dan polisi rahasia menjadi sosok yang sangat ditakuti, sekaligus dibenci.¹³ Mereka melancarkan penyidikan, intimidasi, pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang memusuhi rezim Shah.

Iran di dalam kondisi ekonomi dan politik yang sangat kacau, mahasiswa di Qumm melakukan demonstrasi melawan aksi pembunuhan tanpa alasan oleh pasukan Savak. Polisi menembaki sejumlah demonstran, dan memancing timbulnya gerakan demonstran berikutnya. Setiap hari dalam empat puluh hari terjadi gerakan protes dan demonstrasi yang skalanya semakin besar. Pada bulan Muharram (akhir tahun 1978), berjuta-juta rakyat berdemonstrasi menentang rezim. Fedai'yan-i Khalq dan Mojaheedin-i Khalq bangkit kembali.¹⁴ Para pekerja minyak mogok, pedagang pasar menutup toko mereka, sementara pihak militer tidak mampu meredakan gerakan pemberontakan ini. gerakan ini dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh liberal dibawah arahan tokoh Ayatollah Khomeini.

¹¹ *Ibid.*, hal 254.

¹² *Ibid.*, hal. 255.

¹³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam.*, hal.58-59.

¹⁴ *Ibid.*, hal 60.

Gerakan revolusi Iran ini berhasil menggulingkan kerajaan Shah dan mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Rezim baru ini dibangun berdasarkan kepemimpinan kharismatik Ayatollah Khomaeni. Revolusi Iran 1979 tidak mencerminkan permusuhan berkepanjangan antara negara dan agama. Melemahnya negara, menguatkan organisasi keagamaan, dan kelonggaran kultural bagi perlawanan ulama Iran, menghantarkan pada pergolakan revolusioner dengan mengatasnamakan Islam.¹⁵

Iran Modern Pasca Revolusi

Bidang Pendidikan

Pendidikan di Iran masih bersifat sentralistik terdiri dari pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan (*ministry of education*), sedangkan pendidikan tinggi di bawah naungan dan pengawasan Departemen Ilmu dan Teknologi.

Pendidikan Pra-Sekolah. Jenjang pendidikan di Iran dimulai dari taman kanak-kanak untuk anak yang berkisar umur 5-6 tahun, lama pendidikan satu tahun, di mana tahap ini bersifat opsional (tidak diwajibkan). Pendidikan pra-sekolah pada umumnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

Pendidikan dasar (Dabestan) untuk anak berumur antara 6 tahun sampai dengan 11 tahun, jangka waktu pendidikan lima tahun, wajib diikuti oleh semua warga Negara. Pendidikan menengah/siklus orientasi (*Rahnamayi*) untuk anak berkisar antara umur 11 tahun sampai dengan 14 tahun. Lama belajar 3 tahun.¹⁶

Pendidikan Menengah Untuk tingkat SMA (Dabirestan), lama belajar 3 tahun, tidak diwajibkan bagi setiap warga negara. Pada tingkat ini telah mengarah kepada keretampilan/teknis dimana antara teori dan praktik untuk setiap program diseimbangkan. Untuk teori terdiri atas matematika, fisika, ilmu-ilmu ekspremental, sastra, dan humaniora. Sebelum masuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, setiap siswa diharuskan mengikuti persiapan masuk ke perguruan tinggi (*Konkoor*) selama satu tahun. Setelah lulus persiapan masuk perguruan tinggi, mahasiswa dapat melanjutkan ke program perguruan tinggi dengan tahapan sebagai berikut: 1) Teknik/*vocational school* (*Fogh-e-Diplom* atau *Kardani*) lama pendidikan dua tahun. 2) Univesitas/*bachelor degree* (*Karsenase* atau *licence*) lama pendidikan empat tahun. 3) Master degree (*karsenase-ye Arsyad* atau *Fogh Lisence*) lama pendidikan dua tahun. 4) Program doktor/PhD (*Karsenasi-Arshad-napayvasteh* atau *Doktora*) lama pendidikan tiga tahun. Hari libur resmi memperingati peristiwa yang berhubungan dengan agama.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 62.

¹⁶ M. Noor Fuady, *Pendidikan Islam di Iran* (Tinjauan Historis Pra dan Pasca Revolusi), hal. 103-104. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2016. (Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin).

<ul style="list-style-type: none"> - Tasua 9 Muharram - Asyura 10 Muharram - Arba'in 20 Safar - Wafatnya Nabi Muhammad dan kesyahidan Imam Hasan 28 Safar - Kesyahidan Imam Reza 29 Safar - Lahirnya Nabi Muhammad Saw dan Imam Ja'far Shadiq 17 Rabiul Awal - Wafatnya Fatimah 3 Jumadil Tsani 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelahiran Imam Mahdi 15 Syaban - Kesyahidan Imam Ali 21 Ramadhan - Idul Fitri 1 Syawal - Kesyahidan Imam Ja'far Shadiq 25 Syawal - Idul Qurban 10 Dzulhijjah - Idul Ghadir 18 Dzulhijjah - Mab'ats (pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah) 27 Rajab.
--	--

ICRO, *Iran Tanah Peradaban* (Jakarta: Fauzi Mandiri, 2009) hal. 35.

Bidang Keagamaan

Pada tanggal 3 Juni 1963, bertepatan dengan 10 Muharram, yang merupakan hari ritual kaum Syi'ah paling emosional. Imam al-Khumaini mengungkapkan dalam pidatonya penyangkalan tuduhan sementara yang ditujukan kepada kaum ulama sebagai golongan reaksioner, kaum ulama ingin kembali ke zaman pertengahan dan golongan ulama menentang modernisasi. Ia menuntut peranan Islam dalam konstitusi. Karena Islam baginya adalah sumber kebebasan dan kebesaran. Ia menegaskan, penghinaan terhadap ulama sama dengan penghinaan terhadap Islam. Hal ini pada intinya tersimpul dalam dua motif utama. Pertama, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Shah terhadap konstitusi Iran pelanggaran sumpah yang diucapkan Shah untuk memelihara dan melindungi Islam. Kedua, sikap ketergantungan Shah terhadap kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan Israel.¹⁷

Aktifitas politik al-Khumaini ternyata berpengaruh terhadap masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan demonstrasi dan pemberontakan di beberapa kota di Iran. Situasi ini membawa kepada penahanan al-Khumaini oleh pemerintah. Pada tahun 1964, ia diasingkan. Awalnya ia diasingkan ke Turki, baru kemudian di perkenankan pergi Najf, Irak dan terakhir ke Paris tahun 1979. Bagi pemerintah, dengan cara pengasingan ini diharapkan pengaruh al-Khumaini akan berakhir dan popularitasnya akan surut. Tetapi kenyataannya, selama dalam pengasingan, ia secara periodik masih mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai Iran. Pernyataan pernyataan sampai ke Iran dan membawa pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan opini publik Iran. Disebutkan misalnya, soal penyelenggaraan peringatan 25 abad berdirinya kerajaan Iran yang banyak menghabiskan biaya dan sistem partai tunggal (partai Rostabliz) buatan Shah (1975-1978).¹⁸ Pada tahun 1998 :

¹⁷ Ajat Sudrajat, *Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran*, hal. 38-39. Jurnal Cakrawala Pendidikan Nomor 1, Tahun Xv, Februari 1996.

¹⁸ *Ibid.*

61.532.000 kecenderungan Madzhab Syiah 93,4 %, Ahlussunnah 5,6 %, Kristen 0,3 %, Zoroaster 0,05%, Yahudi 0,05%.¹⁹

Bidang Politik

Konsep Imamah dan Pemikiran Wilayah al-Faqih

Kaum Syi'ah berpendapat bahwa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi saw. sebagai kepala negara adalah Ali Ibn Abi Thalib dan keturunannya. Kaum Syi'ah Dua Belas berkeyakinan bahwa sebelum Nabi saw. wafat, ia telah menentukan Ali ibn Abi Thalib sebagai, penggantinya sehingga kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan sesudah Ali adalah Hasan, kemudian Husein dan seterusnya. Selengkapnya mereka adalah (1) Ali ibn Abi Thalib, (2) AI-Hasan ibn Ali, (3) AI-Husein ibn Ali, (4) AJi Zain alAbidin, (5) Muhammad al-Baqir, (6) Ja'far al-Shadiq, (7) Musa alKadhim, (8) Ali al-Ridla, (9) Muhammad al-Jawad, (10) Ali al-Hadi, (11) AI-Hasan al-Askari, dan (12) Muhammad al Muntadzar.²⁰

Perkembangan pemikiran tentang Imamah dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, ketika para Imam masih hidup. Tahap ini ditekankan pada pengesahan para Imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi. Dalam Syi' ah Dua Belas, tahap ini dikenal sebagai tahap penulisan hadis-hadis para Imam. Kedua, pemikiran yang berlangsung setelah gaibnya Imam ke 12, baik gaib sughra dari tahun 873-941M / 260-329 H maupun selama gaib kubra dari tahun 941 dan seterusnya.²¹ Munculnya konsep Wilayah al-Faqih ini berkaitan dengan tugas wakil Imam mengenai wakil umum dan wakil untuk urusan umum dua bentuk perwakilan yang terdapat pada masa kegaiban kubra. Wakil umum dijabat oleh ulama mujtahid, yang tugasnya terbatas pada kasus khusus seperti jihad dan khumus. Sementara wali untuk urusan umum dijabat oleh mujtahid dengan klaim bahwa dirinya sebagai wakil umum dan disertai tugas kepemimpinan Imam.

Wilayah Al-Faqih Al-Khumaini dan Negara Syi'ah Modern

Al-Khumaini menyatakan, konsep Wilayah al-Faqih berkaitan dengan konsep pemikiran politik keagamaan Syi'ah seperti kesetiaan, imamah dan taqlid. Kepemimpinan Islam terkristalkan dan diwujudkan dalam Imamah. Selama keghaiban Imam al-Muntadzar, Imamah dilanjutkan oleh kepemimpinan faqih yang memenuhi syarat dalam urusan keagamaan dan sosial politik. Hubungan rakyat dengan Faqih didenisikan dengan konsep taqlid, yaitu mematuhi Faqih.²²

Pokok-pokok pemikiran mengenai Wilayah al-faqih ini kemudian secara terperinci dijelaskan oleh al-Khumaini dalam bukunya *Valayat-i Faqih*. Ia mengatakan, penunjukan Nabi Muhammad atas Ali ibn Abi Thalib sebagai

¹⁹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh CWF, Syi'ah menduduki peringkat 89% dari seluruh populasi negara. Muhammad Ali Shomali, *Cakrawali Syi'ah*. Terjemahan Endang Zulaicha Susilawati (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012) Cet. I, hal. 178.

²⁰ Ajat Sudrajat, *Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran*, hal., 40.

²¹ *Ibid.*, hal. 41.

²² *Ibid.*

penggantinya, tidak terbatas pada otoritasnya membuat hukum, tetapi adalah otoritas untuk melaksanakan hukum dan menjalankan pemerintah Islam. Selama kegaiban Imam al-muntadzar, kaum syi'ah harus tampil memimpin umat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengisyaratkan adanya dua kali kualifikasi bagi seorang pemimpin, yaitu Faqih dan adil.²³

Menurutnya kaum Syi'ah harus dan dibenarkan mencari ulama untuk menempati posisinya sebagai pemimpin, kepala negara. Pemerintahan yang didirikannya adalah pemerintah yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu dibutuhkan ulama yang luas dan mendalam pengetahuannya tentang syari'at. Syarat ini hanya dapat dipenuhi dan dimiliki oleh para faqih. Karena itulah para Faqihlah sebagai figur yang paling siap untuk memimpin pemerintahan atau negara. Republik Islam Iran disebut Negara syi'ah Modern karena konsitusinya memuat konsep Wilayah al-Faqih al-Khumaini. Seorang Faqih menempati posisi istimewa sebagai pemimpin negara.²⁴

Pada bagian Muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat UUD-RII), antara lain tertulis: "Rencana Pemerintahan Islam yang berdasarkan Wilayah al-Faqih yang disarankan oleh Imam al-Khumaini..." (UUD RII, t.t.:4). Dan selanjutnya dinyatakan bahwa: "berdasarkan prinsip-prinsip Wilayah al-faqih dan kepemimpinan yang terus menerus (Imamah), maka UUD mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan bagi seorang faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai faqih yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. (UUD-RII,t.t.: 19).²⁵

KESIMPULAN

Iran di abad sembilan belas berada dalam cengkremen Rusia dan Inggris. Hal ini berdampak pada merosotnya perekonomian rakyat khususnya para petani. Mereka kehilangan lahannya sehingga tidak mempunyai mata pencaharian, dengan begitu mereka jatuh miskin. Para intelektual, tokoh agama, pedagang, dan sebagainya melakukan demonstrasi besar-besaran. Namun mereka banyak yang mengalami penindasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, sehingga berikutnya muncul demonstrasi yang lebih besar. Puncaknya adalah terjadinya Revolusi Iran pada 1979. Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang berhasil menumbangkan dinasti Pahlevi yang telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran dari monarki absolut menjadi republik Islam. Sebuah revolusi rakyat yang pertama dalam perempat terakhir abad kedua puluh melawan sebuah sistem politik otoriter modern. Namun pengalaman Iran ini tidak memberikan jawaban pasti bagi persoalan-persoalan antara Islam dan demokrasi. Akan tetapi setidaknya Iran telah menunjukkan kepada dunia bahwa

²³ *Ibid.*, hal. 41-42.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

partisipasi politik rakyat dan konsensus merupakan bagian dari cakrawala politik di republik Islam Iran.

Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu momentum yang menentukan masa depan politik Islam serta hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan perkembangan sistem politik yang demokratis. Pada Kamis 7 September 1978, terjadi lagi demonstrasi besar yang diperkirakan pada saat itu terdapat sebanyak 500.000 dari berbagai wilayah di Iran berkumpul untuk menyanggah pengumuman Hukum Darurat Perang oleh Dekrit Kerajaan. Dua tokoh yang bisa dikatakan sebagai pencetus adanya revolusi Iran adalah Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini. Keduanya memiliki peran besar dalam menggerakkan masa untuk melakukan Revolusi menentang rezim Pahlevi.

REFERENSI

- Hamid, Abdul & Yaya. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- ICRO. *Iran Tanah Peradaban*. Jakarta: Fauzi Mandiri, 2009.
- Kadir, Abd. *Syi'ah dan Politik: Studi Republik Islam Iran*. Jurnal Politik Profetik Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015. Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar.
- L. Esposito, Jhon. *Islam dan Politik*. terj. M. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Maryam, Siti, dkk. *Sejarah Peradaban Islam; Dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2009.
- M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Terj. Ghufron A. Mas'adi. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- MS, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Noor Fuady, M. *Pendidikan Islam di Iran (Tinjauan Historis Pra dan Pasca Revolusi)*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Obert Voll, Jhon. *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Terj. Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997. Cet. 1
- Sudrajat, Ajat. *Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran*. Jurnal Cakrawala Pendidikan Nomor 1, Tahun XV, Februari 1996.
- Tamara, Nasir. *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.